

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, serta disiplin peserta didik. Dalam lingkungan sekolah, para pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Sekolah juga menjadi tempat bagi peserta didik untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan individu yang memiliki beragam karakter dan latar belakang, sehingga membentuk nilai-nilai sosial yang positif.

Wahjosumidjo (2010, 18) dalam bukunya *Kepemimpinan Kepala Sekolah* menyatakan, bahwa:

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Kompleksitas sekolah terlihat dari berbagai dimensi dalam organisasi yang saling berkaitan dan menentukan satu sama lain. Sementara itu, keunikan sekolah sebagai organisasi tercermin dalam ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Ciri-ciri tersebut menjadikan sekolah sebagai organisasi dengan karakteristik tersendiri, di mana berlangsung proses belajar mengajar serta pembudayaan kehidupan umat manusia.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sekolah merupakan sebuah institusi yang memiliki karakteristik khas. Sebagai sebuah organisasi, sekolah tentu memerlukan seorang pemimpin. Dalam hal ini, Kepala Sekolah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin serta mengarahkan para guru dan staf agar visi dan misi sekolah dapat terwujud. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif serta membangun karakter peserta didik, termasuk dalam membentuk budaya disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas.

Salah satu aspek kedisiplinan yang masih menjadi masalah di kalangan peserta didik adalah kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

masih menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, termasuk peserta didik. Banyak peserta didik yang masih sering melakukan pelanggaran lalu lintas, baik saat berangkat maupun pulang sekolah. Padahal, peraturan lalu lintas telah secara normatif mengatur ketentuan berkendara yang aman di jalan raya.

Kondisi saat ini, di lingkungan sekolah, Kepala Sekolah belum secara maksimal melakukan edukasi dan pembinaan terhadap peserta didik agar disiplin, tertib, dan menerapkan budaya ramah di jalan. Akibatnya, banyak peserta didik yang masih berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas.

Beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh peserta didik tingkat SMA, sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan helm pengaman baik sebagai pengemudi maupun penumpang kendaraan roda dua.
2. Tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat berkendara.
3. Berboncengan lebih dari satu orang.
4. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan raya.
5. Memodifikasi sepeda motor sehingga tidak sesuai dengan standar keamanan.
6. Mengendarai sepeda motor sambil merokok.
7. Menggunakan headset saat mengendarai sepeda motor.
8. Menggunakan ponsel saat berkendara.

Kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam berlalu lintas telah menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Kota Cirebon. Kecelakaan yang sering terjadi umumnya melibatkan pengemudi usia produktif, yakni antara 13 hingga 18 tahun. Sebagai generasi muda, peserta didik merupakan aset berharga sekaligus harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara. Mereka juga merupakan calon pemimpin masa depan yang akan mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perhatian serius harus diberikan agar mereka tidak menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Upaya ini memerlukan

peran aktif dari berbagai pihak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah.

Edukasi di lingkungan sekolah terhadap peserta didik perlu dilakukan oleh Kepala Sekolah melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam pembinaan generasi muda. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membentuk wadah pembinaan seperti Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dan Polisi Sahabat Peserta Didik (PSP), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan peserta didik dalam berlalu lintas.

Dengan menerapkan pendekatan manajerial yang efektif, kepala sekolah dapat menjadi agen perubahan dalam membentuk karakter disiplin peserta didik. Melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan sekolah dapat menjadi lingkungan yang tidak hanya mencetak individu yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Dengan demikian, manajemen kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang lebih bertanggung jawab dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Menurut Sulistyorini (2009, 21), bahwa, “tinggi rendahnya mutu suatu sekolah sering kali ditentukan oleh kepemimpinan Kepala Sekolah. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial Kepala Sekolah dalam mengelola guru dan tenaga kependidikan yang ada”.

Sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan, Kepala Sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja guru serta menentukan efektivitas lembaga pendidikan. Tidak akan ditemukan sekolah yang baik dengan Kepala Sekolah yang buruk, begitu pula sebaliknya, sekolah yang buruk tidak akan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang baik. Kepala Sekolah yang berkualitas akan bersikap dinamis dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pendidikan. Selain itu, Kepala Sekolah juga berperan penting dalam membina dan mengedukasi peserta didik di lingkungan sekolah. Salah

satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan Kepolisian Sektor maupun Kepolisian Resor guna meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas serta membangun budaya ramah di jalan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, terdapat beberapa tugas utama kepala sekolah, yaitu:

1. Merencanakan program yang berkaitan dengan proses belajar mengajar.
2. Melaksanakan program pendidikan secara efektif dan efisien.
3. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembelajaran dan administrasi sekolah.
4. Memimpin sekolah dalam mengembangkan visi, misi, dan tujuan pendidikan.
5. Menerapkan sistem informasi sekolah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menegaskan bahwa guru memiliki fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan. Dengan demikian, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membina dan meningkatkan profesionalisme guru guna menciptakan sekolah yang berkualitas dan disiplin.

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola proses pembelajaran agar berjalan efektif serta memastikan bahwa seluruh elemen sekolah berfungsi dengan baik. Manajemen kepala sekolah yang baik akan menghasilkan lembaga pendidikan yang disiplin dan berkualitas. Untuk menciptakan sekolah yang berorientasi pada kedisiplinan, dibutuhkan manajemen profesional yang dikelola oleh tenaga-tenaga yang kompeten, bertanggung jawab, dan didukung oleh sarana serta prasarana yang memadai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 14 tentang Pendidikan menengah, kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri atau pejabat terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, serta pendayagunaan sarana dan

prasarana. Sementara itu, kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan penyelenggara sekolah yang bersangkutan.

Seorang kepala sekolah yang baik harus menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, pemilihan kepala sekolah harus mempertimbangkan kompetensi dan integritasnya. Kepala sekolah bukan sekadar administrator, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu menginspirasi guru, staf, dan peserta didik untuk berperilaku disiplin serta menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan.

Manajemen Kepala Sekolah merupakan aspek penting dalam menjalankan tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan seorang Kepala Sekolah. Mutu sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan Kepala Sekolah, mengingat sekolah yang bermutu menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi para *stakeholder*. Oleh karena itu, hanya manajemen yang baik yang mampu mengupayakan tercapainya tujuan pendidikan, baik secara nasional, institusional, maupun individual, sesuai dengan yang diharapkan.

Seorang Kepala Sekolah tidak hanya dituntut untuk menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif dan lingkungan sekolah yang nyaman, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial agar sekolah memiliki keunikan serta identitas yang khas. Pelaksanaan manajemen Kepala Sekolah harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar budaya sekolah dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh seluruh warga sekolah.

Menurut George R. Terry (dalam Sukarna, 2011:3), manajemen adalah “suatu proses yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengendalian), yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara optimal”. Dalam manajemen yang baik, terdapat koordinasi tim kerja yang solid, identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara

rasional, efisiensi dalam pendanaan, serta taktik yang tepat untuk mencapai tujuan secara efektif.

Manajemen merupakan pedoman umum yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Selain itu, manajemen juga berfungsi sebagai rencana strategis yang menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Setiap organisasi yang dikelola dengan baik pasti memiliki sistem manajemen, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa tantangan besar bagi Kepala Sekolah dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik. Berbagai permasalahan moral yang belum terselesaikan masih sering terjadi di kalangan peserta didik, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, membolos, tidak mengerjakan tugas sekolah, serta pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan. Kondisi ini mengharuskan Kepala Sekolah mencari strategi yang efektif untuk menanamkan disiplin berlalu lintas kepada peserta didik.

Disiplin berlalu lintas yang berbasis budaya ramah di jalan dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 77, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”

Budaya ramah di jalan mencerminkan etika berlalu lintas yang menunjukkan rasa hormat terhadap sesama pengguna jalan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas. Setiap pengendara di jalan raya wajib berkendara dengan aman, tertib, dan penuh konsentrasi. Berkendara tanpa konsentrasi termasuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009. Selain itu, Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dengan mematuhi etika berlalu lintas,

lingkungan yang harmonis dapat tercipta serta risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak, termasuk sekolah dan masyarakat, untuk bersama-sama menanamkan budaya disiplin berlalu lintas kepada generasi muda.

Implementasi Budaya Ramah di Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Berkendara dengan aman, tertib, dan penuh konsentrasi.
2. Mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL).
3. Menghormati sesama pengguna jalan.
4. Tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti perasaan atau merugikan pengguna jalan lain.
5. Menempatkan ruang lalu lintas sebagai ruang publik yang harus digunakan secara bertanggung jawab.
6. Tidak berkendara dengan perilaku yang sewenang-wenang atau semaunya sendiri.
7. Tidak menempatkan pengguna jalan lain dalam kondisi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahaya.
8. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda sebagai pengguna jalan yang lebih rentan.
9. Menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) jika fasilitas tersebut tersedia di lokasi yang bersangkutan.

Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ juga mengatur hak keselamatan pejalan kaki, yang mencakup:

1. Ketersediaan fasilitas pendukung keselamatan, seperti trotoar, zebra cross, dan jembatan penyeberangan.
2. Prioritas bagi pejalan kaki saat menyeberang di tempat penyeberangan yang telah disediakan.

3. Hak untuk menyeberang di lokasi yang dipilih jika fasilitas penyeberangan tidak tersedia, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Dengan menerapkan budaya ramah di jalan serta memahami hak dan kewajiban dalam berlalu lintas, diharapkan tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, serta nyaman bagi semua pengguna jalan. Disiplin berbasis budaya ramah di jalan dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang memengaruhi kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya. Faktor ini meliputi pengetahuan yang dimiliki remaja tentang peraturan lalu lintas serta kesadaran akan dampak pelanggaran lalu lintas, seperti risiko kecelakaan.
2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu dan dapat memengaruhi peningkatan atau penurunan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Faktor eksternal ini mencakup sarana dan prasarana lalu lintas, peran orang tua, pengaruh teman sebaya, serta peran polisi lalu lintas dalam menegakkan aturan dan memberikan edukasi.

Menurut Gultom (2019:26), salah satu faktor yang dapat meningkatkan disiplin berbasis budaya ramah di jalan (berlalu lintas), yaitu:

Pendidikan. Pendidikan nonformal, seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Demikian pula, sosialisasi yang diberikan di lingkungan sekolah berperan krusial dalam membentuk kesadaran dan sikap berlalu lintas yang baik. Pembentukan disiplin sejak dini kepada peserta didik menjadi langkah awal dalam menanamkan kebiasaan tertib berlalu lintas dan menciptakan generasi yang lebih sadar akan keselamatan di jalan.

Menurut Astuti (2015:84), bahwa, “teori yang digunakan untuk mengkaji disiplin peserta didik berbasis budaya ramah di jalan pada remaja adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, yang dikenal dengan skema *AGIL* (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*).

Paradigma *AGIL* merupakan model sosiologi yang dikembangkan oleh Parsons pada tahun 1950an untuk menjelaskan fungsi sosial yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat agar dapat mempertahankan stabilitas sosial.

Dalam konteks disiplin berlalu lintas, keempat unsur AGIL dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Adaptation* (Adaptasi): Kemampuan remaja untuk menyesuaikan diri dengan aturan lalu lintas yang berlaku, termasuk mematuhi perintah dan larangan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan): Tujuan utama dari pembentukan profil disiplin peserta didik berbasis budaya ramah di jalan adalah terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
3. *Integration* (Integrasi): Upaya menghubungkan adaptasi, pencapaian tujuan, dan latency dalam sistem yang lebih luas. Integrasi ini mencakup aturan hukum dalam Undang-Undang Lalu Lintas, didukung oleh sarana prasarana yang memadai serta peran kepolisian lalu lintas sebagai penegak hukum dan pengawas ketertiban di jalan.
4. *Latency* (Pemeliharaan Pola): Peran pendidikan dari orang tua, sekolah, dan teman sebaya dalam membentuk kebiasaan disiplin berlalu lintas di kalangan remaja, sehingga budaya ramah di jalan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Menurut media Pikiran Rakyat (diakses pada 8 November 2022), bahwa berdasarkan riset dari Kementerian Perhubungan, pada tahun 2019 terjadi 106.573 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia, di mana 73,9 persen di antaranya melibatkan sepeda motor. Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, menyebutkan bahwa lebih dari 175 ribu sepeda motor mengalami kecelakaan pada tahun tersebut, dengan mayoritas korban berada dalam rentang usia 15-60 tahun. Peserta didik dengan rentang usia 10-19 tahun menempati urutan kedua sebagai kelompok yang paling

banyak menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2016, jumlah korban kecelakaan dalam kelompok usia tersebut mencapai 14.214 orang, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 8.906 orang pada tahun berikutnya. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, korban kecelakaan yang berasal dari jenjang pendidikan SMA tercatat sebanyak 138.995 orang pada tahun 2019. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, yakni menjadi 132.423 orang.

Berdasarkan data dari Polres Cirebon Kota, jika dilihat dari tabel di bawah ini, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah peserta didik yang melakukan pelanggaran lalu lintas selalu melebihi seribu kasus setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berlalu lintas di kalangan peserta didik masih perlu mendapatkan perhatian serius.

Pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, serta melanggar rambu-rambu lalu lintas. Tingginya angka pelanggaran ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai budaya tertib berlalu lintas, baik melalui peran sekolah, keluarga, maupun aparat kepolisian.

Diperlukan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan pihak kepolisian untuk menanamkan disiplin berlalu lintas sejak dini, guna mengurangi angka kecelakaan dan membangun budaya ramah di jalan bagi para peserta didik. (data pelanggaran lalu lintas dari segi usia terlampir)

Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk kelompok pelanggar berusia 13 hingga 15 tahun, terdapat fluktuasi dalam jumlah pelanggaran, di mana terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Namun, penurunan ini bukan disebabkan oleh meningkatnya kesadaran disiplin berlalu lintas, melainkan akibat diberlakukannya PPKM sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Dengan membandingkan data

sebelum dan sesudah pandemi, dapat disimpulkan bahwa apabila edukasi mengenai keselamatan dan disiplin berlalu lintas dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, maka tingkat pelanggaran di kalangan peserta didik dapat dikendalikan. Selain itu, berdasarkan data dalam tabel di atas, kelompok usia 16 hingga 30 tahun tercatat sebagai pelanggar lalu lintas terbanyak jika ditinjau dari aspek usia.

Data yang bersumber dari Satlantas Polres Cirebon Kota pada 23 Juli 2022 menunjukkan bahwa jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan oleh peserta didik meliputi berkendara tanpa menggunakan helm, kendaraan tidak sesuai standar, belum atau tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, serta tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Dari berbagai jenis pelanggaran tersebut, yang paling dominan adalah tidak memiliki surat-surat berkendara, terutama SIM. Hal ini disebabkan oleh usia peserta didik yang umumnya belum memenuhi syarat untuk memperoleh SIM, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Tingkat disiplin dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas di lingkungan sekolah, khususnya di SMAN 1 dan SMAN 7 Cirebon, masih menghadapi berbagai permasalahan. Jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan di kedua sekolah tersebut adalah tidak membawa SIM dan STNK, sedangkan pelanggaran yang paling jarang terjadi adalah mengendarai kendaraan sambil merokok. Selain itu, terdapat juga peserta didik yang tidak menggunakan helm saat berkendara, mengendarai kendaraan yang tidak sesuai standar, serta melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sebagian besar peserta didik tidak menyadari bahaya yang mengintai mereka saat melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh, banyak di antara mereka yang mengabaikan pentingnya menggunakan helm, padahal helm merupakan alat keselamatan yang sangat vital bagi pengendara kendaraan bermotor. Dalam banyak kasus kecelakaan, tidak menggunakan helm dapat berakibat fatal, seperti gegar otak, cedera kepala

serius, hingga kematian. Jika dibandingkan antara kedua sekolah, tingkat pelanggaran lalu lintas di SMAN 7 Cirebon lebih tinggi, dengan persentase mencapai 100%, sedangkan di SMAN 1 Cirebon sebesar 95%. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di kalangan peserta didik masih menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak sekolah, keluarga, serta instansi terkait guna meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas di kalangan remaja.

Astuti & Suwanda (2015: 17) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa, kesadaran dan tanggung jawab remaja terhadap keselamatan di jalan raya dapat diwujudkan dengan menghindari balapan liar serta menggunakan helm berstandar SNI. Selain sikap kehati-hatian, kewaspadaan juga merupakan aspek penting dalam berkendara, termasuk pemahaman tentang aturan lalu lintas sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko kecelakaan. Selain itu, sikap toleransi terhadap pengguna jalan lain serta kesadaran akan keberadaan petugas polisi lalu lintas turut mendukung terciptanya keselamatan berkendara. Cara berkendara yang baik mencakup kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, penggunaan kelengkapan kendaraan yang sesuai, serta sikap sopan santun terhadap sesama pengendara.

Sutawi (dalam Maryam, 2014: 32) menegaskan bahwa, “salah satu aspek utama dari disiplin berlalu lintas adalah kesadaran, di mana pengendara harus selalu memperhatikan dan menaati rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara.” Rambu-rambu lalu lintas berfungsi sebagai tanda perintah, peringatan, dan petunjuk bagi pengendara agar dapat berkendara dengan aman dan tertib. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan.

Menurut Esha (2017: 31), bahwa “pendidikan merupakan upaya manajemen untuk menyiapkan manusia yang memiliki kompetensi unggul”. Pendidikan diharapkan dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk individu yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan emosional. Dengan demikian, pendidikan harus mampu mencetak

generasi yang tidak hanya memiliki kecakapan akademik, tetapi juga keterampilan sosial yang memadai. Menurut Riuspika (2014: 23), bahwa:

siswa dan seluruh anggota sekolah yang berperilaku disiplin secara konsisten akan memberikan pengaruh besar bagi lingkungan sekolah, sehingga terbentuk budaya disiplin yang menjadi ciri khas sekolah tersebut. Lingkungan sekolah yang mendukung kedisiplinan, meskipun perubahan terjadi secara bertahap, akan mampu mengubah tingkah laku dan perilaku seluruh warga sekolah secara positif. Sebuah proses pendidikan yang baik akan menghasilkan pencapaian yang baik pula.

Sedangkan Musfah (2015: 28) menegaskan bahwa, “keberhasilan proses pendidikan sangat bergantung pada penerapan disiplin di lingkungan sekolah”. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap disiplin di sekolah masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keteladanan dari para pendidik, tenaga kependidikan, serta kepala sekolah. Selain itu, lemahnya penerapan tata tertib sekolah juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kedisiplinan. Oleh karena itu, sejak awal, siswa harus dikenalkan dengan lingkungan sekolah yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Sekolah harus mampu meyakinkan siswa bahwa perilaku baik dan prestasi cemerlang hanya dapat diraih melalui disiplin yang tinggi. Tanpa adanya kedisiplinan, fungsi sekolah tidak akan berjalan dengan optimal, potensi siswa akan terhambat, dan bahkan berisiko terlibat dalam berbagai masalah sosial.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Kota Cirebon dan SMA Negeri 7 Kota Cirebon menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas manajemen kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas. yaitu:

1. Kurangnya penguatan manajemen kepala sekolah dalam mewujudkan pengelolaan pembelajaran yang sistematis, yang mencakup

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses pembentukan karakter peserta didik berbasis budaya ramah di jalan.

2. Belum optimalnya peran guru dalam memberikan edukasi kepada peserta didik terkait disiplin berlalu lintas dan budaya ramah di jalan, baik dalam kegiatan pembelajaran formal maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler.
3. Proses pembelajaran yang belum efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran disiplin peserta didik terkait budaya ramah di jalan, terutama dalam hal penerapan tata tertib berlalu lintas di sekolah dan di luar sekolah.
4. Sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai, seperti kurangnya fasilitas parkir yang tertata dengan baik, kurangnya rambu-rambu lalu lintas di lingkungan sekolah, serta belum adanya media pembelajaran yang memadai terkait edukasi keselamatan berlalu lintas.
5. Minimnya regulasi dan kebijakan sekolah yang mengatur disiplin berlalu lintas secara khusus, seperti aturan mengenai penggunaan kendaraan oleh peserta didik serta sanksi bagi pelanggar tata tertib lalu lintas di sekolah.
6. Kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap peserta didik dalam menerapkan budaya disiplin berlalu lintas di lingkungan sekitar mereka.
7. Kurangnya program kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan komunitas pecinta keselamatan lalu lintas, yang seharusnya dapat berperan dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait budaya disiplin berlalu lintas bagi peserta didik.
8. Masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta didik, seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak

memiliki SIM, tidak membawa STNK, berkendara melebihi batas kecepatan, serta tidak mematuhi rambu lalu lintas.

9. Kurangnya kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, yang terlihat masih banyak siswa yang mengabaikan aturan serta menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang biasa.
10. Belum maksimalnya implementasi program pembiasaan di sekolah yang berorientasi pada budaya ramah di jalan, seperti penyuluhan rutin, kampanye keselamatan berlalu lintas, serta simulasi berkendara yang aman dan disiplin.
11. Program kemitraan dan pendanaan yang belum terealisasi secara optimal, sehingga upaya peningkatan disiplin peserta didik berbasis budaya ramah di jalan belum dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Kajian-kajian akademik terkait dengan manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan profil disiplin peserta didik pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dalam jurnal yaitu:

Regina, S., Rizana, S., & Saputra, A. A. (2023). Kepemimpinan kepala sekolah dalam membentuk karakter disiplin peserta didik di SD Negeri 157 Palembang. *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*. Masalah: Tingkat kedisiplinan peserta didik di SD Negeri 157 Palembang masih rendah, terlihat dari banyaknya siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Temuan: Kepala sekolah menerapkan strategi seperti keteladanan, teguran atau nasihat, motivasi, kegiatan rutin atau pembiasaan, serta pendampingan dan pengawasan untuk meningkatkan kedisiplinan. Kesimpulan: Kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam membentuk karakter disiplin siswa melalui berbagai pendekatan yang bersifat mendidik dan membangun kebiasaan positif.

Priambodo, R. B., & Ikwandi, M. R. (2023) menjelaskan bahwa peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di

SDN Sumpat Sidoarjo. PANDU: *Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum*. Masalah: Ditemukan bahwa masih ada siswa yang kurang disiplin dalam menaati peraturan sekolah, terutama dalam aspek ketepatan waktu dan berpakaian. Temuan: Kepala sekolah berhasil meningkatkan disiplin peserta didik melalui penerapan aturan ketat terkait ketaatan terhadap peraturan, disiplin waktu sekolah, dan disiplin dalam berpakaian. Kesimpulan: Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai disiplin dalam berbagai aspek kehidupan sekolah.

Dilla, R. (2023) menjelaskan bahwa strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. *Jurnal Economica Didactica*. Masalah: Kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti aturan sekolah, termasuk dalam hal kehadiran, keterlambatan, dan kepatuhan terhadap tata tertib. Temuan: Kepala sekolah menerapkan strategi pemodelan (keteladanan), pengajaran (sosialisasi dan motivasi), komunikasi dengan siswa, serta evaluasi kedisiplinan. Kesimpulan: Pendekatan berbasis keteladanan dan komunikasi yang baik antara kepala sekolah, siswa, serta orang tua dapat meningkatkan kedisiplinan siswa.

Rohman, (2018) menjelaskan bawah peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MI Al-Ihsan Pamulang. *Jurnal Pendidikan Islam*. Masalah: Beberapa siswa di MI Al-Ihsan Pamulang masih kurang patuh terhadap peraturan sekolah, terutama dalam hal kehadiran dan kepatuhan terhadap guru. Temuan: Kepala sekolah menggunakan pendekatan berbasis peraturan yang konsisten, pemberian sanksi yang adil, dan penghargaan bagi siswa yang menunjukkan perilaku disiplin. Kesimpulan: Kepemimpinan yang tegas, tetapi tetap adil dan memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi dalam disiplin, dapat meningkatkan kepatuhan siswa terhadap peraturan sekolah.

Fransisko, A. (2018) menjelaskan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin kerja tenaga kependidikan di SMPN 2 Sungai Tara. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Masalah: Rendahnya disiplin kerja tenaga kependidikan yang berdampak pada kurang optimalnya proses belajar mengajar di SMPN 2 Sungai Tara. Temuan: Kepala sekolah menerapkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam meningkatkan disiplin kerja tenaga kependidikan serta mengoptimalkan komunikasi di lingkungan sekolah. Kesimpulan: Kepemimpinan yang mengedepankan kerja sama dan komunikasi efektif berperan besar dalam meningkatkan kedisiplinan tenaga kependidikan, yang secara tidak langsung berdampak pada lingkungan sekolah yang lebih baik.

Fahmi, A. F, (2017). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di SDN Pakamban Laok Pragaan Sumenep. *Jurnal Pendidikan Dasar*. Masalah: Kualitas kinerja guru yang kurang optimal berdampak pada rendahnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti aturan sekolah. Temuan: Kepala sekolah berperan dalam meningkatkan kualitas kinerja guru melalui supervisi dan pelatihan yang efektif, yang secara tidak langsung mempengaruhi kedisiplinan siswa. Kesimpulan: Peningkatan profesionalisme guru melalui pembinaan kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih disiplin dan kondusif bagi peserta didik.

Kurniawan, W, (2018). Budaya tertib siswa di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*. Masalah: Masih terdapat siswa yang belum memiliki budaya tertib dalam kehidupan sekolah, seperti keterlambatan dan ketidakpatuhan terhadap tata tertib. Temuan: Kepala sekolah memiliki peran dalam membangun budaya tertib dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan contoh yang baik, serta memberikan sanksi dan penghargaan secara seimbang. Kesimpulan: Penerapan budaya tertib

yang konsisten di sekolah akan membentuk kedisiplinan siswa dalam jangka panjang dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

Pemilihan SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon sebagai lokus penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Kedua sekolah tersebut terletak di lingkungan perkotaan dengan tingkat mobilitas peserta didik yang tinggi, sehingga memiliki tantangan dalam membangun budaya disiplin, terutama dalam konteks kepatuhan berlalu lintas dan sikap ramah di jalan. Selain itu, karakteristik sosial dan budaya peserta didik yang beragam di kedua sekolah ini memungkinkan adanya variasi dalam strategi manajemen kepala sekolah dalam menanamkan nilai-nilai disiplin dan budaya tertib berlalu lintas.

Berdasarkan observasi awal, masih ditemukan permasalahan terkait kesadaran berlalu lintas di kalangan peserta didik, seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, melanggar rambu lalu lintas, hingga kurang menghormati pejalan kaki. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan manajerial yang lebih efektif dari kepala sekolah dalam membentuk budaya disiplin peserta didik tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Selain itu, dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah daerah juga menjadi alasan penting dalam pemilihan lokus penelitian ini. SMAN 1 dan SMAN 7 telah memiliki berbagai program kedisiplinan yang telah diterapkan, seperti patroli siswa, sosialisasi tata tertib lalu lintas, serta kerja sama dengan kepolisian, namun efektivitas dan tantangan dalam implementasinya masih perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi manajemen kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berbasis

disertasi dengan judul: “Manajemen Kepala Sekolah Berbasis Budaya Ramah di Jalan dalam Meningkatkan Disiplin Peserta Didik Berlalu Lintas (Studi Kasus di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon).” Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh model manajemen kepala sekolah yang efektif dalam meningkatkan disiplin peserta didik berbasis budaya ramah di jalan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik di tingkat sekolah dan pemerintah daerah.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

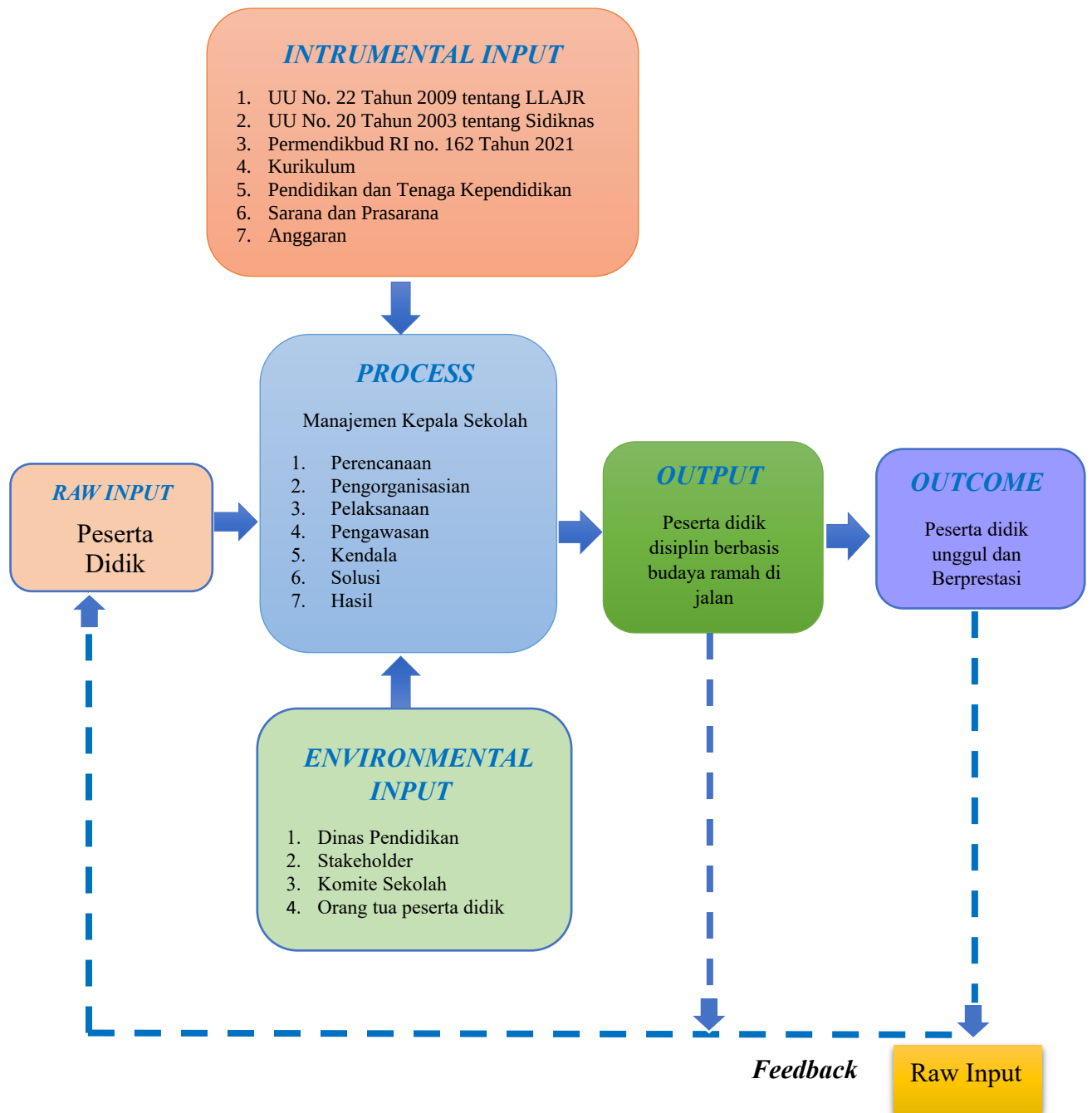
Implementasi manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik berbasis budaya ramah di jalan mengacu pada teori manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry (2009: 21), yang terdiri dari tahapan: Perencanaan (*Planning*) meliputi penyusunan strategi, kebijakan, dan program berbasis budaya ramah di jalan, Pengorganisasian (*Organizing*): Koordinasi peran dan tanggung jawab antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, Pelaksanaan (*Actuating*): Implementasi kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin peserta didik dalam berlalu lintas, Pengawasan (*Controlling*) meliputi *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas program serta identifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, manajemen kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas merupakan sebuah upaya strategis dalam menumbuhkan kesadaran disiplin peserta didik. Upaya ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, sikap sopan dalam berlalu lintas, serta kesadaran terhadap keselamatan diri dan orang lain di jalan. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu: Rendahnya kesadaran disiplin peserta didik dalam berlalu lintas, Kurangnya pemahaman peserta didik

tentang aturan lalu lintas dan etika berkendara, Minimnya peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk budaya disiplin berlalu lintas. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran disiplin berlalu lintas di lingkungan sekolah, Belum optimalnya penerapan manajemen kepala sekolah dalam membangun budaya disiplin berbasis budaya ramah di jalan.

Dalam pelaksanaannya, manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik berbasis budaya ramah di jalan mengacu pada teori manajemen yang dikemukakan oleh G. R. Terry (2020:21), yang terdiri dari tahapan: Perencanaan (*Planning*): Penyusunan strategi, kebijakan, dan program berbasis budaya ramah di jalan, Pengorganisasian (*Organizing*): Koordinasi peran dan tanggung jawab antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, Pelaksanaan (*Actuating*): Implementasi kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin peserta didik dalam berlalu lintas, Pengawasan (*Controlling*): Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program serta identifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya

Untuk memperjelas konsep penelitian ini, rumusan masalah akan dituangkan dalam diagram atau skema yang menghubungkan input, proses, output, dan outcome secara sistematis, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Perumusan Masalah

Faktor-faktor yang mendukung manajemen kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas sebagai mana pada gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Raw Input, yaitu peserta didik dengan beragam karakteristiknya, termasuk latar belakang sosial, budaya, dan kebiasaan mereka dalam berlalu lintas. *Instrumental Input*, yaitu Regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi disiplin berbasis budaya ramah di jalan, meliputi: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud RI Nomor 162 Tahun 2021 tentang Implementasi Kurikulum, Kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai disiplin berlalu lintas, Pendidik dan tenaga kependidikan yang berperan dalam membimbing peserta didik, Sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran disiplin berlalu lintas, Anggaran sebagai pendukung implementasi program.

Environmental Input, yaitu Lingkungan eksternal yang turut mempengaruhi efektivitas penerapan manajemen kepala sekolah, meliputi: Dinas Pendidikan yang memberikan kebijakan dan dukungan program, Stakeholder terkait yang berkontribusi dalam program disiplin berlalu lintas. Komite Sekolah yang berperan dalam pengawasan dan evaluasi program, Orang tua peserta didik yang berperan dalam mendukung kebiasaan disiplin di rumah dan lingkungan sekitar.

Dalam proses penerapannya, manajemen kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas mencakup tahapan : Perencanaan, yaitu Merancang strategi dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, Pengorganisasian, yaitu Mengalokasikan sumber daya dan peran masing-masing pihak, Pelaksanaan, yaitu Implementasi program dengan metode yang efektif. Pengawasan, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jalannya program, Identifikasi kendala, yaitu Upaya mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan program, Penyusunan Solusi, yaitu melakukan penentuan langkah strategis dalam menghadapi kendala, dan Evaluasi hasil, yaitu menilai efektivitas program dalam meningkatkan disiplin peserta didik.

Tujuan akhir dari implementasi manajemen kepala sekolah ini adalah tercapainya *Output*, yaitu terbentuknya peserta didik yang disiplin berbasis budaya ramah di jalan. Sementara itu, *outcome* yang lebih luas dari program ini adalah terciptanya peserta didik yang unggul dan berprestasi, tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam sikap dan karakter yang mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab sosial.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya cakupan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan focus. Pembatasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas, meliputi: 1) Tujuan perencanaan; 2) Materi perencanaan; 3) Media perencanaan, dan 3) Rencana evaluasi
- b. Pengorganisasian Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas, meliputi: 1) Uraian tugas, 2) Struktur organisasi, 3 Standar Operasional Prosedur (SOP).
- c. Pelaksanaan Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas, yang terdiri dari: 1) Tahap pendahuluan, 2) Tahap inti kegiatan, dan 3) Tahap penutup kegiatan.
- d. Pengawasan Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas, yang meliputi: 1) Teknik pengawasan, 2) Analisis hasil pengawasan, dan 3) Tindak lanjut.
- e. Kendala yang dihadapi Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas, meliputi: 1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Sarana dan prasarana, serta 3) Anggaran.

- f. Solusi masalah Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas, meliputi: 1) Sumber Daya Manusia, 2) Sarana dan Prasarana, serta 3) Anggaran.
- g. Hasil pelaksanaan program, yang diharapkan mencakup: 1) peningkatan disiplin peserta didik dan 2) Penurunan pelanggaran aturan lalu lintas.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang manajemen kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji tentang manajemen kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon, meliputi:

- 1) Perencanaan kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas.
- 2) Pengorganisasian kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas.
- 3) Pelaksanaan kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas.
- 4) Pengawasan kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas.
- 5) Kendala kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas.
- 6) Solusi kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas.

- 7) Hasil kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam meningkatkan disiplin peserta didik berbasis budaya ramah di jalan.

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan konsep manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin peserta didik berbasis budaya ramah di jalan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya literatur mengenai manajemen pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter dan budaya disiplin di sekolah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, terutama dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik berbasis budaya ramah di jalan.

1) Bagi Lembaga Pendidikan

- a) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi sekolah dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi program kedisiplinan peserta didik yang berbasis budaya tertib berlalu lintas.
- b) Memberikan wawasan bagi sekolah dalam menyusun kebijakan disiplin yang lebih terstruktur dan berbasis karakter.
- c) Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan program kerja sama dengan instansi terkait, seperti dinas pendidikan dan kepolisian, guna menciptakan lingkungan sekolah yang lebih disiplin dan aman.

2) Bagi Kepala Sekolah

- a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan disiplin peserta didik berbasis budaya ramah di jalan.
- b) Membantu kepala sekolah dalam memahami faktor-faktor yang mendukung serta menghambat implementasi program kedisiplinan, sehingga dapat merancang solusi yang tepat.
- c) Dapat menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program disiplin di sekolah.

3) Bagi Guru

- a) Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam membangun budaya disiplin di lingkungan sekolah melalui pendekatan yang lebih terstruktur.
- b) Memberikan motivasi bagi guru untuk meningkatkan semangat mengajar dan menerapkan metode pembelajaran yang dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada peserta didik.
- c) Mendorong guru untuk lebih aktif dalam membimbing peserta didik agar memahami pentingnya budaya tertib berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin peserta didik.
- b) Memberikan wawasan tentang pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian terkait pendidikan karakter dan budaya disiplin di sekolah.
- c) Mampu membuka wacana akademik mengenai pentingnya budaya disiplin peserta didik berbasis budaya ramah di jalan,

serta memberikan saran bagi lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan karakter disiplin peserta didik secara berkelanjutan.

D. Pertanyaan Penelitian

Mengingat penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara menyeluruh dan komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan manajemen kepala sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas. Fokus penelitian ini diarahkan pada peran Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsi manajerialnya di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon?
2. Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon?
3. Bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon?
6. Bagaimana solusi yang diterapkan oleh Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon?

7. Bagaimana hasil yang dicapai dari upaya Kepala Sekolah berbasis budaya ramah di jalan dalam meningkatkan disiplin peserta didik berlalu lintas di SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Cirebon?